

## Strategi Pemerintah Simeulue Dalam Pencegahan dan Penanganan Prevalensi Stunting Pada Anak Balita

Miri Susanti<sup>1</sup> Nellis Mardhiah

Universitas Teuku Umar, Jln Alue Peunyareng, Meulaboh, 23615, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: February 00, 00  
Revised: March 00, 00  
Accepted: March 00, 00  
Available online: April 00, 00

### KEYWORDS

Stunting, Governance, Children under five, Strategi, Prevention

### CORRESPONDENCE

Phone:  
E-mail:

### A B S T R A C T

Since stunting was raised by the government as a national issue, stunting has become one of the words that are currently familiar to our ears. Through various media, the government continues to campaign about the dangers of stunting, so it is very necessary to immediately set steps and strategies to prevent and deal with it. Based on the Simeulue Regent's Regulation Number 13 of 2019 concerning Integrated Stunting Prevention and Handling in the Village, it is based on the election of Simeulue Regency as the national stunting locus set by the Central Ministry. Another reason is the high rate of stunting in children under five in Simeulue Regency. The purpose of this study is to describe the Government's strategy in overcoming the prevalence of stunting in children under five in Simeulue Regency. The research approach used in this research is descriptive qualitative, this type of research with the process of obtaining data is what it is and emphasizes more on the results. Where data collection is done through analysis of policy documents, interviews and literature studies. Literature study is to use references that support the content of scientific research from books, websites or articles related to the research discussion. According to the research results, local governments can achieve indicators of stunting prevention success with maximum performance, collaboration with stakeholders and actions taken in stunting prevention and control in Simeulue Regency.

### PENDAHULUAN

Keadaan dimana balita gagal tumbuh pada tubuh dan otak sebab kurangnya gizi pada jangka panjang serta memiliki keterlambatan dalam berfikir merupakan pengertian dari pada stunting. Stunting sudah terjadi saat masih di kandungan dan akan terlihat ketika anak telah beranjak 2 tahun. Keadaan balita pendek atau stunting adalah suatu masalah gizi yang di alami oleh sebagian besar balita saat sekarang ini. Di tahun 2017, ada 22,2% atau 150.8 juta balita alami kejadian stunting di dunia lebih dari setengahnya yang asalnya dari Asia (55%) dan sebagiannya (39%) berada di Afrika. Di Asia, balita stunting dari 83,6 juta balita stunting, Asia Selatan yang merupakan jumlah tertinggi (58,7%) dan Asia Tengah merupakan proporsi paling sedikit adalah 0,9%. Terkumpulnya data jumlah balita stunting dari *World Health Organization* (WHO) menunjukkan di Indonesia termasuk kedalam negara ketiga dengan angka stunting tertinggi pada regional Asia Tenggara/ *South-East Asia Regional* (SEAR). Jumlah balita stunting di Indonesia pada tahun 2005-2017 sekitar 36,4% (Saputri & Tumangger, 2019).

Ujungnya stunting secara luas pasti menghambat pertumbuhan ekonomi serta kemiskinan meningkat, stunting juga dapat berdampak pada perkembangan motorik dan verbal,

meningkatnya penyakit degeneratif, terjadinya kesakitan bahkan sampai pada kematian (Yadika et al., 2019). Skor Pola Pangan Harapan (PPH) serta Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Kecukupan Protein (AKP) bukan suatu hubungan yang signifikan dengan kejadian stunting (Suryana et al., 2018). Perkembangan kognitif serta prestasi belajar sangat di pengaruhi oleh stunting di mana selain gangguan pertumbuhan yang di alami, kondisi anak stunting juga merasakan gangguan ketika proses pematangan otak dapat menurunkan prestasi belajar anak (Yadika et al., 2019). Kejadian stunting juga berhubungan dengan asupan makan, maka dari itu perlu sekali di sarankan kepada orang tua agar memberikan gizi makanan yang beraneka ragam pada anak serta memberikan gizi yang seimbang untuk balita agar pertumbuhannya dapat dengan maksimal dan juga mencegah terjadinya gangguan gizi pada balita (Apri Sulistianingsih, 2016). Terdapat hubungan yang bermakna terhadap lahir berat badan rendah dan kasus stunting, di mana terdapat hubungan antar pemberian air susu ibu dengan kasus stunting yang diperoleh (Fitri, 2018).

Prevalensi kejadian stunting pada anak balita di Indonesia masih cukup tinggi yaitu 36,5%, melampaui batas *non public health* WHO yaitu 20% (Widanti, 2017). Di Indonesia

salah satu Provinsi yang tinggi angka stuntingnya adalah Provinsi Aceh. Di Tahun 2018, disebutkan Riset Kesehatan Dasar Indonesia menyebutkan bahwa di Aceh angka stunting menduduki posisi ke-31 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan persentase 37,3% sehingga menempati peringkat ke tiga tertinggi. Faktor-faktor determinan daripada stunting yaitu faktor pendapatan keluarga, pola asuh ibu, riwayat imunisasi, riwayat infeksi, pendidikan ibu serta asupan protein (Picauly & Toy, 2013). Berdasarkan hasil itu dapat mengarahkan bahwa prevalensi stunting sampai sekarang menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat terutama di Provinsi Aceh dan Kabupaten Simeulue merupakan salah satu kabupaten tinggi angka stuntingnya.

Tantangan terhadap implementasi konvergensi yaitu ada terdapat ego sektoral di para ODP sebab belum maksimalnya sosialisasi oleh sebab itu masih banyak yang belum mengerti keseluruhan tentang program pencegahan dan penanganan stunting. Oleh sebab itu pendampingan dari pusat sangat di butuhkan oleh daerah dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Halangan yang lain yaitu tidak memperoleh seluk-beluk saat melakukan penelitian dalam melaksanakan program, serta belum ada basis data yang diperoleh untuk konvergen dalam bentuk sasaran proram pelaksanaan kegiatan berjalan dengan maksimal (Permanasari et al., 2020). Di tahun 2022, pemerintah telah menyusun kebijakan terbaru yaitu kegiatan dalam proses seribu hari pertama kehidupan sadar gizi yang tujuannya adalah untuk mengatasi masalah anak stunting di Indonesia yang semakin memprihatinkan. Di mana kebijakan ini tidak dapat diatasi oleh instansi kesehatan saja, tetapi juga memerlukan kerja sama lintas sektoral (Maywita, 2018)

Kabupaten Simeulue menduduki urutan ke dua angka prevalensi stunting di Provinsi Aceh paling tinggi dari 23 Kabupaten/Kota sehingga masuk ke dalam kategori tidak aman bersama dengan 13 Kabupaten yang terdiri dari Aceh singkil, Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Basar, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Bireun, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Aceh Jaya, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Pada tahun 2015 sebanyak 35,7% persentase anak balita stunting di Kabupaten Simeulue. Selanjutnya, menurun ke angka 28,6% pada tahun 2016 dan kembali meningkat pada tahun 2017 yaitu sekitar 35,7% (Simeulue, 2021).

Dukungan pemerintah pusat terutama anggaran sangat dibutuhkan bagi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan berbagai program intervensi penanganan stunting, inovasi Pemerintah Daerah untuk terus mengawal program stunting sangat menentukan keberhasilan program Pemerintah dalam pemberantasan stunting, Inovasi tersebut perlu diberikan apresiasi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk penghargaan dan reward sinergi antar institusi pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat harus terus ditingkatkan, karena program penanganan stunting tidak akan pernah berhasil jika tidak ada sinergi antar pihak Aspek regulasi dan peraturan akan membuat langkah pemerintah dan para pihak menjadi lebih cepat. Koordinasi data dan informasi dengan pemerintah pusat terutama Kementerian Kesehatan menjadi sangat penting dan perlu ditingkatkan (Sujai, 2020). Pada tahun 2020, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bappenas Nomor 42 Tahun 2020 dan Nomor 10 Tahun 2021, dari 360 Kabupaten/Kota di Indonesia dan salah satu dari 10

Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang di tetapkan sebagai salah satu lokus stunting Nasional adalah Kabupaten Simeulue.

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan tersebut, penulis dapat merumuskan masalah dari pada penelitian ini adalah; Bagaimana cara Pemerintah untuk mencegah dan menangani prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue ?, dan bagaimana usaha Pemerintah bekerjasama dengan para stakeholder dalam pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue ?. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue serta menguraikan informasi bagaimana Pemerintah Kabupaten Simeulue menciptakan kerjasama dengan semua pihak yang bertanggungjawab terhadap pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue.

Dalam Rumusan Masalah pertama, untuk menggambarkan strategi Pemerintah Simeulue dalam pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue maka dari itu penelitian ini mengarah kepada tahapan-tahapan strategi meliputi tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi pencegahan dan penanganan stunting yang sudah termasuk tugas BAPPEDA Kabupaten Simeulue.

Manfaat dari penelitian ini agar menjadi dasar pengetahuan serta referensi tentang strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Simeulue. (2) Bagi pemerintah Kabupaten Simeulue khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), diharapkan lebih inovatif dalam menginisiasi program/ kegiatan terkait percepatan penurunan serta mengevaluasi pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue

## METODE

Penelitian ini dilakukan di kantor BAPPEDA Kabupaten Simeulue yang bertempat di Desa Air Dingin, Kecamatan Simeulue Timur. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret s.d Agustus 2021. Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana dapat menghasilkan data deskriptif. Untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan dalam metode penelitian tersebut (Moleong, 1998). Berdasarkan dengan ketentuan strategi pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue, dengan memperoleh data yang bersifat apa adanya dan lebih di tekankan daripada hasilnya yang merupakan jenis penelitian ini. Peneliti juga ikut serta dalam kegiatan rapat koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan stunting di Bappeda Kabupaten Simeulue. Di mana instrumen kunci di perankan oleh peneliti serta pengumpulan data yang dilaksanakan dengan dokumen kebijakan yang di analisis serta studi pustaka yang berupa penggunaan referensi yang mendukung isi dari penelitian ini yang sumbernya dari buku, antikel, atau website yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak stunting diangkat oleh pemerintah sebagai isu nasional, stunting menjadi salah satu kata yang belakangan ini akrab di telinga kita. Melalui berbagai media, pemerintah terus

mengkampanyekan tentang bahayanya stunting sehingga sangat perlu untuk segera diatur langkah dan strategi guna mencegah dan menanganinya. Berbagai kebijakan, peraturan, hingga program/kegiatan diluncurkan oleh Pemerintah untuk mengatasi permasalahan stunting ini, dan hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Indonesia sadar atas bahaya yang mengancam generasi bangsa Indonesia di masa mendatang.

Stunting merupakan masalah yang sudah sejak lama terjadi dan bukan merupakan hal baru lagi, baik secara nasional maupun di daerah-daerah tak terkecuali Kabupaten Simeulue. Sebagaimana Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kabupaten Simeulue tentunya turut menyadari bahwa dampak buruk stunting juga menjadi ancaman nyata bagi masa depan generasi Kabupaten Simeulue. Oleh karena itu, pemerintah tentunya sepakat bahwa permasalahan stunting ini perlu untuk segera diatasi agar dampak jangka panjang yang merugikan generasi Simeulue dari isu stunting ini dapat dihindari.

Kabupaten Simeulue yang telah ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten lokus stunting Nasional oleh Pemerintah Pusat, lokus stunting terintegrasi pada Tahun 2020 dan Tahun 2021. Penetapan tersebut disahkan melalui keputusan kepala BAPPENAS Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 dan Nomor 10 Tahun 2021. Tugas pemerintah daerah untuk mengupayakan angka-angka stunting di kabupaten Simeulue, tidak hanya pemerintah daerah, diperlukan peran lembaga-lembaga, organisasi, masyarakat dan stakeholder terkait lainnya untuk ikut serta berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue.

### Strategi Pemerintah Simeulue dalam Pencegahan dan Penanganan Prevalensi Stunting di Kabupaten Simeulue

Adapun Strategi Pemerintah dalam Pencegahan dan Penanganan Prevalensi Stunting pada Anak Balita di Kabupaten Simeulue yaitu :

1. Memperkuat peran dinas terkait melalui koordinasi lintas sektor yang dikoordinir oleh Bappeda Kabupaten Simeulue.
2. Menetapkan regulasi pendukung yang terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting.
3. Merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, mengevaluasi, dan memonitor program kegiatan lintas sektor yang terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting.
4. Melaksanakan 8 aksi konvergensi stunting sesuai petunjuk teknis kementerian dalam negeri.
5. Membangun kerjasama dengan lembaga, organisasi, akademisi, masyarakat, dan berbagai stakeholder terkait lainnya.

Peran Pemerintah dalam pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue bisa di perhatikan pada merumusan strategi yang di rencanakan dan dilaksanakan. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Desa, disebutkan alasan dikeluarkan peraturan tersebut untuk meningkatkan komitmen pemerintah dan para stakeholder mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai

dengan pemantauan untuk mewujudkan “Simeulue Bebas Stunting Tahun 2022”.

Seperti yang telah kita ketahui, arti daripada pemerintah ialah suatu organisasi yang meliputi atas kumpulan orang-orang yang terpilih untuk berperan mengemban tugas daerah sebagai salah satu wujud pelayanan untuk masyarakat. Sekarang, peran SDM termasuk salah satu faktor yg terpenting dalam organisasi baik negeri maupun swasta. Dalam organisasi, manusia termasuk pegawai yang paling penting dalam menentukan hidup atau matinya suatu organisasi, serta keberhasilan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Nawawi, 2006).

Dalam menyukseskan pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue, para stakeholder dan pemerintah di Kabupaten Simeulue membangun koordinasi yang sifatnya lintas sektor dan melibatkan Bappeda sebagai penyuluhan kebijakan serta anggaran stunting di Kabupaten Simeulue, Dinas PU untuk membuat sarana dan prasarana pencegahan stunting pada masyarakat, Dinas Kebersihan dan dinas terkait lainnya. Kabupaten Simeulue merupakan kabupaten tertinggi ke 2 stunting di provinsi Aceh setelah kota Subulussalam. Prestasi yang diraih pada tahun 2020. Di mana Kabupaten Simeulue dinobatkan sebagai Kabupaten dengan kinerja pencegahan dan penanganan stunting terbaik KE-II tingkat Provinsi Aceh. Dan satu lagi, menyandang predikat sebagai Kabupaten paling replikatif dalam pencegahan dan penanganan stunting di Provinsi Aceh.

Dukungan pemerintah pusat terutama anggaran sangat dibutuhkan bagi Pemerintah daerah dalam mengimplementasikan berbagai program intervensi penanganan stunting. Inovasi pemerintah daerah untuk terus mengawal program stunting sangat menentukan keberhasilan program pemerintah dalam pemberantasan stunting. Inovasi tersebut perlu diberikan apresiasi oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk penghargaan dan rewards Sinergi antar institusi pemerintah dan pihak swasta serta masyarakat harus terus ditingkatkan, karena program penanganan stunting tidak akan pernah berhasil jika tidak ada sinergi antar pihak Aspek regulasi dan peraturan akan membuat langkah pemerintah dan para pihak menjadi lebih cepat. Koordinasi data dan informasi dengan pemerintah pusat terutama Kementerian Kesehatan menjadi sangat penting dan perlu ditingkatkan (Sujai, 2020).

### Perumusan Strategi Pemerintah Simeulue Dalam Pencegahan dan Penanganan Prevalensi Stunting Pada Anak Balita di Kabupaten Simeulue

Dari hasil Formulasi kebijakan perumusan strategi pemerintah dalam pencegahan dan penanganan prevalensi stunting bisa diperhatikan dari formulasi kebijakan yang cara terbentuknya strategi pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Simeulue. Dari proses formulasi, solusi terhadap masalah yang diyakini prioritas utama di Kabupaten Simeulue di tentukan dan didiskusikan pada akhirnya dan telah di tetapkan suatu kebijakan untuk penanganannya. Kemudian setelah terbentuknya kebijakan tersebut, maka berbagai macam bentuk akan lahir strategi yang di anggap mampu untuk memperbaiki masalah yang terjadi, misalnya dalam pencegahan

dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, keputusan kepala BAPPENAS didasarkan atas terpilihnya Kabupaten Simeulue sebagai salah satu Kabupaten lokus stunting Nasional yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pusat, alasan lainnya ialah tingginya prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue. Maka harapan besar Kementerian Pusat, menggunakan dana alokasi khusus dapat difokuskan sebagai penyelesaian masalah prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue. Dan setelah Kabupaten Simeulue ditetapkan sebagai lokus stunting nasional, akan dibutuhkan sasaran lokasi yang akan menjadi lokus pencegahan dan penanganan prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue di setiap desanya.

#### **Kerja Sama antara Pemerintah dengan Stakeholder Pencegahan dan Penanganan Prevalensi Stunting Pada Anak Balita di Kabupaten Simeulue**

Kerjasama yang baik antar pemerintah terhadap para stakeholder dalam pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue, hanya menentukan keberhasilan terhadap pencegahan dan penanganan prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue. Oleh sebab itu untuk melihat sudah sejauh mana kerjasama yang sudah dibangun, dapat di gunakan indikator kontribusi serta tanggung jawab. Pendidikan dan Kesehatan juga merupakan sektor kunci untuk membangun SDM yang bermutu (Ngaisah, 2018).

Pencegahan dan penanganan stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue jika hanya mengharap pemerintah saja tidak akan tercapai, akan tetapi memerlukan dinas-dinas lainnya seperti DINKES, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, PU, Dinas Pendidikan, dan dinas terkait lainnya, bahkan UNICEF juga turut serta dalam mengikuti tenaga kesehatan untuk penurunan angka prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue.

*“Untuk menangani stunting di Kabupaten Simeulue bukan hanya pemerintah, tapi sudah ada tupoksinya masing-masing, keseluruhan dari Dinas harus berkolaborasi, sama-sama untuk di tangani stunting ini “. Pungkas Andri Ifani, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Bappeda Kabupaten Simeulue. Dalam pencegahan dan penanganan prevalensi stunting Bappeda terlibat langsung di dalamnya serta memiliki tanggung jawab untuk mendiskusikan rencana strategi pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue, serta anggaran stunting di Dinas Kesehatan Simeulue. Dari pernyataan salah seorang Kasubid kesejahteraan Sosial di Bappeda menunjukan Bappeda mempunyai peran yang cukup besar dalam penyusunan serta penerapan rancangan anggaran sebagai kelancaran strategi pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue. Hal ini dibuat hanya untuk mewujudkan kabupaten simeulue bebas stunting pada tahun 2022.*

Karena ini memang tidak boleh ditunda apa lagi diabaikan, *“boleh program lain hilang, program stunting tidak boleh karena itu sudah menjadi mandatory yang diberikan dari pusat kepada kita”* pungkas pak Zulfadli Abidin SE, kepala Bappeda

Kabupaten Simeulue. Terlepas hasil evaluasi prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue pada tahun 2020 tentu memberikan pemerintah Kabupaten Simeulue sadar akan keseriusan strategi dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Simeulue di tahun 2021.

Strategi harus konsisten sekitar lingkungan, aksi dilakukan mengambil arus perkembangan masyarakat, terhadap peluang untuk bergerak maju dalam lingkungan. Setiap organisasi bukan sekedar membuat strategi saja, terkait dengan ruang lingkup kegiatannya. Apabila strategi yang di bentuk banyak, maka harus konsistern antara satrategi satu dengan yang lain. Hendaknya strategi yang efektif harus menyatukan dan memfokuskan seluruh sumber daya serta tidak menceraikan-beraikan lainnya. Aksi dalam waktu yang lama sangat butuh diberi ruang dalam pendukung gabungan lintas sektor serta multistakeholders untuk keberlanjutan dan pencapaian sasaran akselerasi terjamin dalam penvegahan dan penanganan prevalensi stunting (Priyono, 2020).

Penyelenggaraan intervensi pencegahan dan penanganan kasus stunting terintegrasi ialah tanggung jawab bersama lintas sektor serta bukan hanya industri saja. Oleh karena itu, dibutuhkan bentuk tim lintas sektor untuk melaksanakan aksi integrasi. Kurang lebih mencakup instansi dalam keanggotaan tim lintas sektor seperti Kesehatan, Perindustrian, Pertanian, pendidikan, Agama, Sosial, Komunikasi & Informasi, Pekerjaan Umum, serta Pemukiman Pemberdayaan Desa, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dan Kependudukan Sipil (Dinkes Kabupaten Simeulue, 2020).

Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam penanggulangan stunting sangat besar dalam hal penyusunan kebijakan serta anggaran dan strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Simeulue. Selanjutnya sebagai metode pelaporan dan pencatatannya, pencegahan dan penanganan prevalensi stunting terintegrasi di Desa menurut pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 bahwa setiap tenaga kerja kesehatan di tingkat desa wajib membuat pencatatan atau pelaporan untuk Dinas Kesehatan dan pencatatan itu di berikan dengan atau tanpa aplikasi. Rencana penurunan kasus stunting ini perlu dimulai dari berbagai kegiatan penambahan mutu *antenatal care* dan mutu pelayanan kesehatan *neonatus* dasar seperti penyuluhan mengenai menyusui secara eksklusif (Java & Tenggara, 2014).

#### **Rembuk Stunting Kabupaten Simeulue Tahun 2021**

Mengingat dampak buruk yang ditimbulkan oleh stunting, maka pemerintah Kabupaten Simeulue mengajak para Stakeholder untuk saling bahu membahu menyusun dan melaksanakan langkah-langkah serta strategi yang terbaik untuk mengatasinya. Pemerintah Kabupaten Simeulue berkomitmen untuk mendukung segala hal dan upaya pencegahan dan penanganan stunting, baik itu kebijakan, regulasi, program/kegiatan serta kebutuhan anggarannya.

Dalam menghalangi kasus stunting, Diperlukan usaha yang sifatnya hilostik serta saling bergabung. Gerakan nasional serta perbaikan gizi dalam Peraturan Peresiden Nomor 42 Tahun 2013 harus di sikapi dengan koordinasi yang sangat kuat serta teknis dan aturan main yang jelas di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai pelaksanaan *Advicasy* perlu

dilaksanakan *knowledge trasfer* dan edukasi sehingga mampu menjelaskan dan melaksanakan peningkatan dalam pemberdayaan status gizi masyarakat (Ketut Aryastami & Tarigan, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Simeulue dalam pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Simeulue yaitu melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Stunting. Setiap Aksi mempunyai instrumen pelaksanaannya masing-masing. Pelaksanaan aksi ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2020 atau tepatnya sejak Kabupaten Simeulue ditetapkan sebagai lokus stunting nasional. Adapun 8 Aksi Konvergensi Stunting yaitu sebagai berikut :

#### 1. Analisis Situasi

Proses pengelolaan data yang mana sebelum membuat agenda Broom, & Canter, (1985). Tujuannya adalah sebagai kumpulan informasi, membuat jenis serta bentuk kegiatan pihak dan publik serta biaya yang di butuhkan untuk pelaksanaan prigram kasus stunting di Kab. Simeulue, disajikan pada Table 1. Aksi I.

Table 1. Aksi I

AKSI I	
Form 1.1	Rekomendasi daftar lokasi prioritas (fokus penanganan)
Form 1.2	Rekomendasi daftar intervensi yang memerlukan prioritas penanganan
Form 1.3	Hasil identifikasi kendala dalam manajemen layanan untuk menysasar Rumah tangga 1000 HPK
Form 1.4	Anjuran hasil analisis situasi

Sumber : BAPPEDA Kab. Simeulue

#### 1. Rencana Kegiatan

Keputusan prosedur perencanaan daftar yang tetap mengenai langkah kerja yang akan diambil dari masa yang akan datang, meliputi tindakan apa, siapa pelaksananya, dimana, serta kapan jadwalnya, serta beberapa pemberitahuan tentang tolak ukurnya dalam hal pencapaian keputusan, disajikan pada tabel 2. Aksi II

Table 2. Aksi II

AKSI II	
Form 2.1	Matriks Rencana Kegiatan Kab/Kota
Form 2.2	Matriks Rencana Kegiatan Kab/Kota
Form 2.3	Matriks pemantauan integrasi Rencana Kegiatan pada tahun berjalan
Form 2.4	Matriks pemantauan integrasi Rencana Kegiatan untuk tahun rencana

Sumber : BAPPEDA Kab. Simeulue

#### 2. Rembuk Stunting

Sebuah langkah yang sangat penting untuk dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk melaksanakan agenda kegiatan intervensi pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita

di Kabupaten Simeulue secara bersama-sama. Disajikan pada table 3. Aksi III

Table 3. Aksi III

AKSI III	
Form 3.1	Salinan undangan
Form 3.2	Salinan paparan hasil analisis situasi dan rekomendasinya
Form 3.3	Salinan paparan rancangan kegiatan
Form 3.4	Salinan berita acara kesepakatan hasil rembuk

Sumber : BAPPEDA Kab. Simeulue

#### 3. Peraturan Bupati/Walikota Tentang Peran Desa

Table 4. Aksi IV

AKSI IV	
Form 4.1	Salinan Peraturan Bupati /Edaran Kepala BPMD tentang Peran Desa
Form 4.2	Daftar desa peserta sosialisasi

Sumber : BAPPEDA Kab. Simeulue

#### 4. Pembinaan KPM

Terpilihnya KPM (Kader Pembangunan Desa ) yang di pilih oleh warga masyarakat desa untuk membantu pemerintah untuk memfasilitasi dan mengawasi kegiatan pembangunan di seluruh Desa di Kabupaten Simeulue.

Tujuan dari pembinaan KPM keseluruhan desa di Kabupaten Simeulue bergerak dengan baik serta kinerja KPM akan maksimal selaras dengan tugas dan fungsinya. Penetapan tugas dan KPM atas melaksanakan integrasi pencegahan dan penanganan kasus stunting di tingkat desa, telah menetapkan SK Kader Pembangunan Manusia, menganggarkan anggaran operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM), menganggarkan anggaran transport local KPM serta Gawai (HP) berbasis Android untuk operasionalisasi penggunaan aplikasi e-HDW. Disajikan pada table 5. Aksi V berikut :

Table 5. Aksi V

AKSI V	
Form 5.1	Daftar desa yang sudah mempublikasikan SK Kepala Desa/Lurah mengenai penunjang KPM
Form 5.2	Daftar Desa yang sudah menganggarkan operasional KPM

Sumber : BAPPEDA Kab. Simeulue

#### 5. Sistem Manajemen Data

Merupakan suatu sistem sebagai pengelola suatu basis data serta menjalankan operasional terhadap data yang diminta seperti banyak jumlah kasus stunting per desa, disajikan pada Table 6. Aksi VI berikut ini :

Table 6. Aksi VI

AKSI VI	
---------	--

Form 6.1	Matriks data prevalensi dan jumlah kasus stunting per desa
Form 6.2	Matriks data cakupan intervensi tingkat kab/kota
Form 6.3	Matriks data cakupan intervensi per desa
Form 6.4	Status Realisasi Kegiatan Perbaikan Sistem Manajemen Data OPD
Form 6.5	Hasil Pemetaan Kondisi Data Sebaran Stunting dan Cakupan Intervensi

Sumber : BAPPEDA Kab. Simeulue

#### 6. Pengukuran dan Publikasi Stunting

Hal tersebut agar usaha Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendapatkan data prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue terkini pada skala pelayanan Puskesmas, Kecamatan dan Desa, disajikan pada table 7. Aksi VII

Table 7. Aksi VII

AKSI VII	
Form 7.1	Hasil Analisis Pengukuran Data Stunting Tingkat Kab/Kota
Form 7.2	Hasil Analisis Pengukuran Data Stunting Tingkat Kecamatan
Form 7.3	Hasil Analisis Pengukuran Data Stunting Tingkat Desa/Kel
Form 7.4	Contoh Publikasi hasil pengukuran untuk tingkat Kecamatan
Form 7.5	Contoh Publikasi hasil pengukuran untuk tingkat Kab/Kota

Sumber : BAPPEDA Kab. Simeulue

#### 7. Reviu Kinerja Tahunan

Kinerja tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dari program dan kegiatan kinerja pelaksanaan pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita selama satu tahun terakhir yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dari Pemerintah Kabupaten Simeulue, disajikan pada Table 8. Aksi VIII berikut:

Table 8. Aksi VIII

AKSI VIII	
Matriks I	Matriks Rencana dan Realisasi
Matriks II	Matriks Permasalahan /Kendala dan Solusi
Matriks III	Matriks III Pemutakhiran Status

Sumber : BAPPEDA Kab. Simeulue

Berdasarkan hasil penelitian yang mana Kabupaten Simeulue mendapat penghargaan dalam penilaian Kinerja stunting dan sebagai Kabupaten Paling Replikatif pada tahun 2020. Pencegahan dan penanganan prevalensi stunting di Kabupaten Simeulue harus benar-benar serius dilakukan oleh semua pihak baik Pemerintah selaku pemimpin daerah, DPRK, para kepala SKPK terkait, khususnya di Dinas Kesehatan dan jajarannya, PKK, para Camat, para kepala Desa, sehingga target pada tahun 2021 menuju peringkat pertama dapat diraih. Stunting juga dapat di selesaikan apabila stunting di setiap daerah bisa di kendalikan (Mugianti et al., 2018). "Kita jangan terlalu bangga atas penghargaan yang telah diberikan akan tetapi kita harus berusaha lebih serius lagi dalam penanganan

kasus stunting di Kabupaten Simeulue ini agar Kabupaten Simeulue keluar dari Kabupaten yang ditetapkan sebagai lokus stunting terintegrasi pada tahun 2022 yang akan datang". Pungkas bapak bupati Simeulue pada acara Rembuk Stunting tahun 2021, agar dapat mewujudkan para generasi yang cerdas, sehat, dan berkualitas baik dalam segi fisik, mental maupun spiritual.

#### KESIMPULAN

Menurut hasil dari penelitian yang telah di lakukan hingga dapat di ambil simpulan bahwa perumusan strategi (formulasi kebijakan) pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita sudah cukup baik di Kabupaten Simeulue dapat kita lihat mulai kejelasan visi dan misi serta tujuan dan sasaran dan tindakan pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue. Strategi yang telah di laksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue baik dari penyelenggaraan edukasi serta kinerja pada tenaga kerja Pemerintahan, Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan Kader Posyandu. Pelaksanaan edukasi tersebut bekerjasama dengan UNICEF.

Jika didapati kenaikan jumlah balita stunting maka pemerintah serta semua dinas yang bersangkutan untuk merubah cara dan memilih jalan keluar terbaik dalam pencegahan dan penanganan prevalensi stunting pada anak balita di Kabupaten Simeulue. Pemerintah Kabupaten Simeulue berharap dapat menghasilkan rencana program/kegiatan yang tepat, serta lebih efektif dan efisien dalam mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Simeulue dengan harus benar-benar serius dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah selaku pemimpin daerah, DPRK, para kepala SKPK terkait, khususnya di Dinas Kesehatan dan jajarannya, PKK, para Camat, para kepala Desa, sehingga target pada tahun 2021 menuju peringkat pertama. Untuk dapat mewujudkan generasi-generasi yang akan datang agar sehat, cerdas, dan berkualitas, baik segi fisik maupun mental serta spritual.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada Allah SWT, dan juga kedua orang tua yang turut mendukung, kepada Ibu Nellis Mardhiah S.Sos, M.Sc, sebagai dosen pembimbing, kepada Ibu Rina Darma Surya ST, MT., sebagai Supervisor, yang sudah memberi saya izin, kesempatan, serta bimbingan dalam rangka penelitian ini serta saya ucapkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Simeulue, lintas sektor, dan bidang P2KAPSDM serta teman-teman seperjuangan, atas data dan informasi yang telah diberikan atas dukungan dan asistensinya selama proses pengumpulan data . Terakhir, terimakasih kepada semua pihak atas perhatian, kontribusi, dan kerjasamanya sampai penelitian ini selesai.

#### REFERENSI

##### Books:

- Moleong, Lexi J. (1998), *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan Kesembilan. Bandung: PT. remaja Rosda Karya.
- Dinkes, (2020), *Perencanaan dan Penurunan Stunting Terintegrasi Kabupaten Simeulue*. Cetakan ke 47 : Rencana Aksi Daerah.
- Nawawi, H. (2006). *Evaluasi dan manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Aryastami, N. K., & Tarigan, I. (2017). *Kajian kebijakan dan penanggulangan masalah gizi stunting di Indonesia*. *Buletin*

**Serial/journal article (online database, such as Ebsco):**

- Apri Sulistianingsih, D. A. M. Y. (2016). Kurangnya Asupan Makan Sebagai Penyebab Kejadian Balita Pendek (Stunting). *Jurnal Dunia Kesehatan*, 5(1), 71–75. <https://www.neliti.com/publications/77123/kurangnya-asupan-makan-sebagai-penyebab-kejadian-balita-pendek-stunting#cite>
- Ketut Aryastami, N., & Tarigan, I. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia Policy Analysis on Stunting Prevention in Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 45(4), 233–240.
- Ngaisah, S. (2018). *Pendampingan analisis situasi daerah tinggi stunting*. 2(1), 71–76.
- Simeulue, D. I. K. (2021). *Strategi Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan Prevalensi Stunting Pada Anak Balita Di Kabupaten Simeulue*. (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/15868/>
- Widanti, Y. A. (2017). Prevalensi, Faktor Risiko, dan Dampak Stunting pada Anak Usia Sekolah. *Jurnal Teknologi Dan Industri Pangan*, 1(1), 23–28.
- Yadika, A. D. N., Berawi, K. N., & Nasution, S. H. (2019). Pengaruh Stunting terhadap Perkembangan Kognitif dan Prestasi Belajar. *Jurnal Majority*, 8(2), 273–282. <http://juke.kedokteran.unila.ac.id/index.php/majority/article/view/2483>

**Serial/journal article (online with DOI):**

- Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury during professional rugby league skills training. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 13 (6), 578–583. doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007
- Fitri, L. (2018). Hubungan Bblr Dan Asi Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Di Puskesmas Lima Puluh Pekanbaru. *Jurnal Endurance*, 3(1), 131. <https://doi.org/10.22216/jen.v3i1.1767>
- Sujai, M. (2020). Peranan Kebijakan Fiskal dalam Meningkatkan Program Pengurangan Stunting Di Indonesia: Studi Kasus Kota Balikpapan. *Journal of Humanity and Social Justice*, 2(2), 99–112. <https://doi.org/10.38026/journalsj.v2i2.45>
- Java, W., & Tenggara, E. N. (2014). Faktor Risiko Stunting Pada Anak Usia 0—23 Bulan Di Provinsi Bali, Jawa Barat, Dan Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Gizi Dan Pangan*, 9(2), 125–132. <https://doi.org/10.25182/jgp.2014.9.2.%p>
- Maywita, E. (2018). Faktor Risiko Penyebab Terjadinya Stunting Pada Balita Umur 12-59 Bulan Di Kelurahan Kampung Baru Kec. Lubuk Begalung Tahun 2015. *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v3i1.24>
- Mugianti, S., Mulyadi, A., Anam, A. K., & Najah, Z. L. (2018). Faktor Penyebab Anak Stunting Usia 25-60 Bulan di Kecamatan Sukorejo Kota Blitar. *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 5(3), 268–278. <https://doi.org/10.26699/jnk.v5i3.art.p268-278>
- Permanasari, Y., Permana, M., Pambudi, J., Rosha, B. C., Susilawati, M. D., Rahajeng, E., Triwinarto, A., & Prasodjo, R. S. (2020). Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. *Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan*, 30(4), 315–328. <https://doi.org/10.22435/mpk.v30i4.3586>
- Picauly, I., & Toy, S. M. (2013). Analisis Determinan Dan Pengaruh Stunting Terhadap Prestasi Belajar Anak Sekolah Di Kupang Dan Sumba Timur, Ntt. *Jurnal Gizi*

*Dan Pangan*, 8(1), 55.

<https://doi.org/10.25182/jgp.2013.8.1.55-62>

- Priyono, P. (2020). Strategi Percepatan Penurunan Stunting Perdesaan (Studi Kasus Pendampingan Aksi Cegah Stunting di Desa Banyumundu, Kabupaten Pandeglang). *Jurnal Good Governance*, 16(2), 149–174. <https://doi.org/10.32834/gg.v16i2.198>
- Saputri, R. A., & Tumangger, J. (2019). Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting Di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.2>
- Suryana, S., Roudza, R., & Alfridsyah, A. (2018). Konsumsi pangan dan skor pola pangan harapan (PPH) dengan prevalensi stunting di Provinsi Aceh (Data Susenas dan PSG tahun 2016). *AcTion: Aceh Nutrition Journal*, 3(2), 149. <https://doi.org/10.30867/action.v3i2.116>

**Internet – no Author no date:**

- <https://aceh.tribunnews.com/2019/11.12.simeulue-urutan-12-stunting-di-aceh-bupati-erli-hasyim-minta-laporan-upaya-penurunan-dari-dinkes>
- Pembinaan Kader Pembangunan Manusia. [https://aksi.bangda.komendagri.go.id/v2/in/main/data\\_detail/233/1455](https://aksi.bangda.komendagri.go.id/v2/in/main/data_detail/233/1455)
- Rencana. <https://id.m.wikipedia.org>
- Rembuk Stunting, Kementrian Dalam Negeri. [https://aksi.bangda.komendagri.go.id/v2/in/main/data\\_detail/223/1453#:~:texs=Rembuk%20Stunting%20Mrupaka%20Suatu%20Langka%20Lembaga%20non%20%20pe%20merintah%20dan%20Masyarakat](https://aksi.bangda.komendagri.go.id/v2/in/main/data_detail/223/1453#:~:texs=Rembuk%20Stunting%20Mrupaka%20Suatu%20Langka%20Lembaga%20non%20%20pe%20merintah%20dan%20Masyarakat)
- Pembinaan Kader Pembangunan Manusia. <https://aksi.bangda.komendagri.go.id>
- Pengukuran dan Publikasi Stunting. [https://aksi.bangda.komendagri.go.id/v2/in/main\\_detail/223/1457](https://aksi.bangda.komendagri.go.id/v2/in/main_detail/223/1457)

**Internet – organization/corporate author:**

- Serambinews.com, *Aceh Peringkat Tiga Stunting*, diakses tanggal 03 Agustus 2020, pukul: 20:15, melalui <https://aceh.tribunnews.com/2019/03/04/aceh-peringkat-tiga-Stunting>
- Broom, & Center, (1985). *Effective Public Relations*. 25 May 2010, 205. [https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis\\_situasi](https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_situasi)
- Ivan, Lanin, (2006). *Sistem Manajemen Basis Data*. Oktober 2020. <https://id.m.wikipedia.org>

**Thesis (online):**

- Rudmini, F. (2020). *Strategi Dinas Kesehatan dalam Penanggulangan Prevalensi Stunting pada Anak Balita Di Kabupaten Simeulue* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry). <https://repository.ar-raniry.ac.id/eprint/15868/>

**Undang-Undang dan Peraturan :**

- Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Desa dan Surat Keputusan Bupati Nomor 050/492/2020 mengenai Penetapan Desa Lokasi Fokus Intervensi Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Simeulue.